

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA KOTA-KOTA YANG ADA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Meilany S.D. Liow¹, Paulus Kindangen², Daisy S.M. Engka³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Kinerja pengelolaan keuangan sendiri tak bisa lepas dari cara pengelolaan keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan program-program maupun permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah masing-masing. Tentu dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta sistem informasi yang baik, untuk menciptakan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan. Tentu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional serta menciptakan kinerja keuangan yang baik maka juga diperlukan pengendalian internal didalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan Teknik analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: *pengelolaan keuangan, efektifitas, efisiensi, kinerja keuangan*

ABSTRACT

Financial management performance itself cannot be separated from the way of financial management itself, good financial management will certainly be able to maximize the financial capacity that is owned to implement programs and problems that are the priority of each local government. Of course, in managing regional finance, it is needed professional staff in the form of superior and capable human resources and a good information system, to create reliable management capabilities. Of course, in carrying out professional financial management and creating good financial performance, internal control is also needed in dealing with various problems faced by regional officials in carrying out their respective duties. The purpose of this study is to determine the effect of financial management as measured by the ratio of effectiveness and efficiency to financial performance in cities in North Sulawesi Province. This type of research is an associative type of research with multiple linear regression data analysis techniques. The results showed that financial management measured by Effectiveness and Efficiency Ratios simultaneously had a significant effect on financial performance, financial management as measured by the Effectiveness Ratio had a positive but not significant effect on financial performance and financial management as measured by Efficiency Ratios had a positive and significant effect on performance finance.

Keywords: *financial management, effectiveness, efficiency, financial performance*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan perekonomian daerah dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang tersedia sejatinya dilakukan untuk dapat sampai ke tahapan perekonomian selanjutnya dimana salah satu ciri utamanya adalah pengelolaan yang serasi dan seimbang di antara satu sektor dan sektor lainnya guna memberi kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah tersebut guna meningkatkan kemandirian serta kemampuan daerah untuk dapat lebih memberi kontribusi dalam perekonomian nasional dan mencapai demokrasi ekonomi.

Sebuah pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah, masyarakat, serta pihak terkait mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang secara maksimal secara efektif dan efisien. Selain itu proses pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam yang dimiliki juga sumber daya manusia yang profesional untuk mengelola dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Keuangan daerah merupakan bukti nyata akan keberhasilan dan kemampuan suatu daerah. Daerah yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangannya tentu akan mampu memaksimalkan pembangunan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Untuk itu pemberian otonomi kepada daerah dianggap menjadi salah satu kunci untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi perekonomian yang dimiliki oleh sebuah daerah. Hal ini menyebabkan perubahan mendasar pada struktur pemerintahan yang ada dari sebelumnya sentralisasi atau terpusat menjadi desentralisasi. Tentu ini tidak lepas dari anggapan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan arah pembangunan ekonomi akan semakin terfokus pada potensi daerah masing-masing dan dapat lebih cepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah secara luas juga mau tidak mau akan berdampak pada kinerja perekonomian yang dimiliki oleh daerah, tentunya daerah yang memiliki tingkat perekonomian yang baik akan menunjukkan perubahan atau peningkatan dalam hal kemandirian daerah atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai anggaran rumah tangganya sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah digulirkan pada 1 Januari 2001. Adanya Undang-Undang tersebut telah mengakibatkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralistik ke arah desentralisasi. Kemandirian daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi perekonomian yang dimiliki secara maksimal dalam rangka meningkatkan perekonomian serta menghapus atau setidaknya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di daerah merupakan tujuan setiap pemerintahan daerah, baik yang sudah lama maupun Daerah Otonomi Baru (DOB). meskipun tidak sedikit masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum bisa memaksimalkan kemampuan daerah yang dimiliki atau dalam kata lain masih belum mampu membiayai pengeluaran daerahnya sendiri, sehingga mau tidak mau masih terus bergantung pada kucuran anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana kedua pokok anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat ini menjadi penunjang utama pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas baik pemerintahan maupun aktivitas perekonomian yang dimiliki, dengan demikian maka perekonomian daerah yang masih dibiayai atau bergantung besar pada kucuran anggaran dari pemerintah pusat menjadikan proses pembangunan baik infrastruktur maupun perekonomian yang ada di daerah masih berjalan dengan lambat dan belum sesuai dengan target pemerintah baik pusat maupun daerah.

Saat ini guna melaksanakan pembangunan perekonomian di daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan antara lain melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Transfer dari pusat, dalam era otonomi daerah seperti saat ini perlu untuk terus dipacu karena pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke daerah akan ikut diikuti oleh pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber

daya nasional yang terdapat di daerah tersebut. Pengalihan pembiayaan dari pusat ke daerah atau yang lebih dikenal sebagai desentralisasi fiskal, dapat pula diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk kemudian dikelola guna mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya wewenang bidang pemerintahan yang diberikan atau dilimpahkan oleh pemerintah pusat.

Dalam hubungannya, antara pemerintah pusat dan daerah menyangkut desentralisasi fiskal, dana perimbangan merupakan salah satu komponen utama yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanjanya di setiap periode. Perimbangan keuangan merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari sekian banyak hubungan yang dimilikinya, hubungan ini sendiri bersifat (intergovernmental fiscal relation system), sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pendelegasian wewenang pemerintah. Tentu kinerja pengelolaan keuangan sendiri tak bisa lepas dari cara pengelolaan keuangan itu sendiri, pengelolaan keuangan yang baik tentu akan dapat memaksimalkan kemampuan keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan program-program maupun permasalahan yang menjadi prioritas pemerintah daerah masing-masing. Tentu dalam mengelola keuangan daerah yang dimiliki diperlukan tenaga-tenaga profesional dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni serta sistem informasi yang baik, untuk menciptakan kemampuan pengelolaan yang dapat diandalkan. Tentu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang profesional serta menciptakan kinerja keuangan yang baik maka juga diperlukan pengendalian internal didalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sulawesi Utara merupakan sebuah wilayah di bagian Indonesia Timur dan berada di ujung utara Pulau Sulawesi. Merupakan sebuah daerah dengan berbagai potensi, mulai dari posisinya sebagai daerah yang bisa menjadi pintu perdagangan dunia karena letaknya yang berada di bibir pasifik dan pelabuhan internasional yang dimiliki. Selain itu pembangunan juga tengah gencar di bangun di daerah ini, mulai dari pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 39,9 Kilometer yang akan menjadi penghubung dan mempercepat perputaran ekonomi yang terjadi di daerah, hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat serta beban tersendiri kepada Kota Manado sebagai ibukota, yang sekaligus berperan sebagai kota jasa. Tentunya dengan makin terbukanya akses ke Kota Manado maka peranan pemerintah dalam mengelola potensi daerah menjadi sangat riskan, terlebih dengan berbagai tuntutan untuk menyediakan infrastruktur maupun fasilitas daerah untuk para investor yang akan datang ke Kota Manado bahkan wisatawan yang datang, tentu berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kota Manado menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang ada. Untuk itu perlu adanya pengembangan serta pemeliharaan sektor-sektor unggulan oleh pemerintah daerah yang tentunya perlu ditunjang dengan anggaran belanja yang mumpuni guna memaksimalkan potensi pendapatan daerah yang dimiliki Kota Manado.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi yang mempengaruhi kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas yang mempengaruhi kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi yang mempengaruhi kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi terhadap kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas terhadap kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi terhadap kinerja keuangan pada kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat,
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran,
3. Disiplin Anggaran,
4. Keadilan Anggaran,
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan
6. Taat Asas.

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain.

1. Transparansi. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Akuntabilitas. Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Value of Money. Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdayaguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Selain itu pemerintah harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan.

Efisiensi adalah perbandingan atau rasio dari keluaran (output) dengan masukan (input). Efisiensi mengacu pada bagaimana baiknya sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Efektivitas adalah derajat pencapaian tujuan dari system yang diukur dengan perbandingan atau rasio dari keluaran (output aktual) yang dicapai dengan keluaran (output) standard yang diharapkan. Efisiensi dapat dikatakan sebagai penghematan penggunaan sumber daya dalam kegiatan organisasi, dimana efisiensi pada 'daya guna'. Dengan efisiensi dimaksudkan pemakaian sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama. Efisiensi merupakan 'ukuran' yang membandingkan rencana penggunaan masukan (input) dengan realisasi penggunaannya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2002) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan. Adapun kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
3. Dana Perimbangan. Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005: Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pada kelompok diatas pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Belanja Daerah

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada pihak publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan bernagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi *asset*, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana

Kinerja Keuangan Daerah perundangan yang berlaku.

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Menurut Halim (2004: 20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

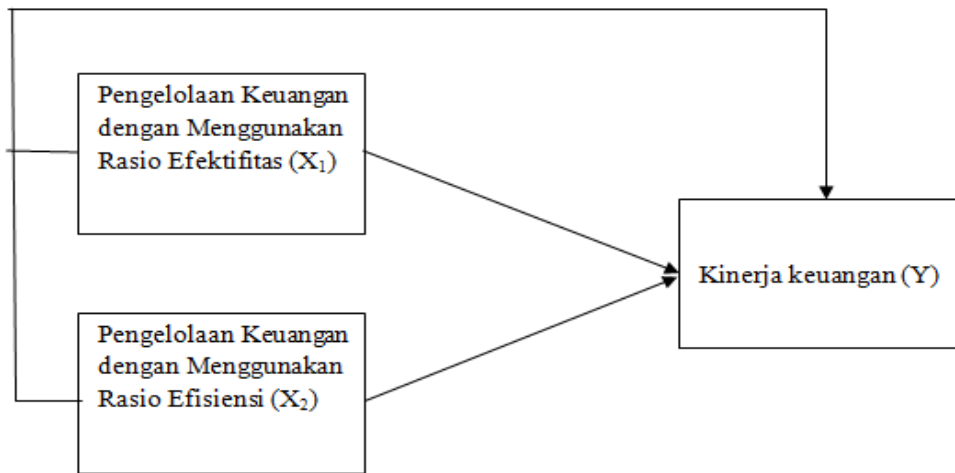
Penelitian Terdahulu

Penelitian Ratna dan Rasrah (2016). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SAKIP pada Pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang berjumlah 366 orang. Sedangkan jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus dari slovin dan diperoleh sampel sebanyak 78 orang. Data diperoleh

menggunakan kuesioner, dengan menggunakan skala likert. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel independen (Pengelolaan Keuangan) terhadap satu variabel dependen (Penerapan SAKIP). Untuk mengetahui pengaruh variable independen terhadap variable dependen digunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Riau berada pada kategori baik. Begitu juga dengan Penerapan SAKIP juga berada pada kategori baik. Hasil pengujian hipotesis dengan uji F, menghasilkan F hitung > dari pada F tabel ($53,746 > 3,04$). Maka dapat disimpulkan bahwa secara statistic variable Pengelolaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ini berarti setiap terjadi kenaikan terhadap Pengelolaan Keuangan daerah, maka akan menambah Penerapan SAKIP, dan begitu juga sebaliknya setiap terjadi penurunan pengelolaan Keuangan Daerah, maka akan berdampak kepada menurunnya Penerapan SAKIP.

Penelitian Kaunang (2016). Untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Manado sangat penting dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah tersebut terlebih dahulu. Beberapa alat analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio kemandirian keuangan daerah, analisis efektifitas, analisis aktivitas dan analisis pertumbuhan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Kota Manado dari tahun 2010-2014 dan apakah Pemerintah Kota Manado sudah mandiri atau belum dalam membiayai daerah sendiri. Dan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang mandiri dalam membiayai daerah sendiri, namun Pemerintah Kota Manado masih terus berusaha untuk bisa mandiri jika dilihat dari peningkatan hasil persentase kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam merealisasikan PAD terbukti dari hasil persentase rasio efektivitas yang rata-ratanya 106.95% dan selalu mengalami peningkatan di tiap tahun, dari rasio aktivitas bisa dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja pembangunan dibanding belanja rutin, dan pertumbuhan Kota Manado sudah cukup baik meskipun masih kurang stabil.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. diduga Pengelolaan Keuangan dengan Menggunakan Rasio Efektifitas (X₁) dan Rasio Efisiensi (X₂) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan
2. diduga Pengelolaan Keuangan dengan Menggunakan Rasio Efektifitas (X₁) berpengaruh terhadap kinerja keuangan

3. diduga Pengelolaan Keuangan dengan Menggunakan Rasio Efisiensi (X_2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data adalah keterangan yang diperlukan dalam penelitian atau dengan kata lain sebagai bahan informasi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk memperoleh data atau keterangan yang ada hubungan dengan penelitian ini maka digunakan data primer. Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber asli melalui wawancara tanpa perantara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari instansi yang relevan yakni badan pengelola keuangan dan aset daerah Sulawesi Utara.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikuto, 1998:33). Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan : perencanaan, pengarahannya, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan.

Diukur dengan rasio efektifitas dan rasio efisiensi dengan rumus sebagai berikut :

$$(X_1) \text{ Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan APBD}}{\text{Target Penerimaan APBD}} \times 100\%$$

$$(X_2) \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan APBD}} \times 100\%$$

2. Kinerja Keuangan : tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Diukur dengan Realisasi PAD.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Penaksiran OLS merupakan penaksiran tak bias linear yang terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE). Jadi, tiap koefisien regresi yang ditaksir dengan menggunakan metode OLS bersifat linear dan tak bias secara rata-rata, penaksiran OLS memiliki varians yang mungkin paling kecil sedemikian rupa sehingga parameter yang sebenarnya dapat ditaksir secara lebih akurat dibanding dengan penaksiran tak bias lainnya. Singkatnya penaksiran OLS bersifat efisien. Model ini digunakan untuk melihat pengaruh Keuangan daerah, sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap kinerja pegawai di badan pengelola keuangan dan aset daerah Sulawesi utara. seluruh perhitungan dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + e$$

dimana :

- Y = Realisasi PAD
- X_1 = Rasio Efektifitas
- X_2 = Rasio Efisiensi

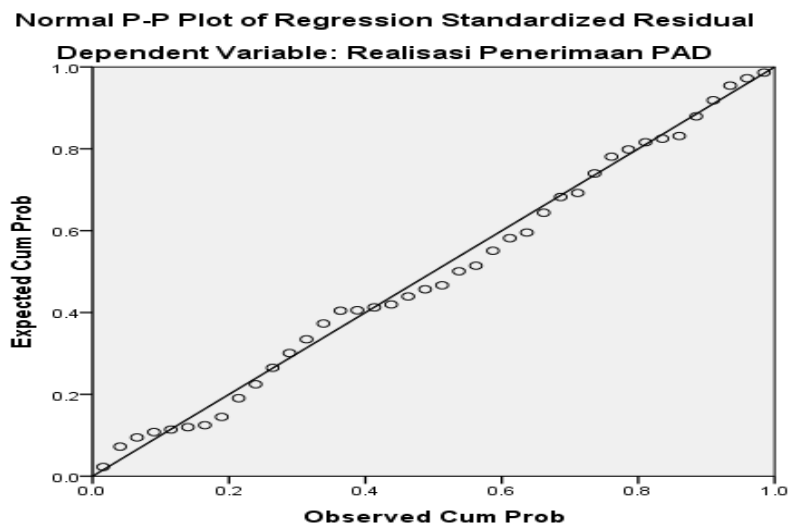
- a = Kostanta
- β_1 = koefisien regresi rasio efektifitas
- β_2 = koefisien regresi rasio efisiensi
- e = standart eror

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Mode regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.



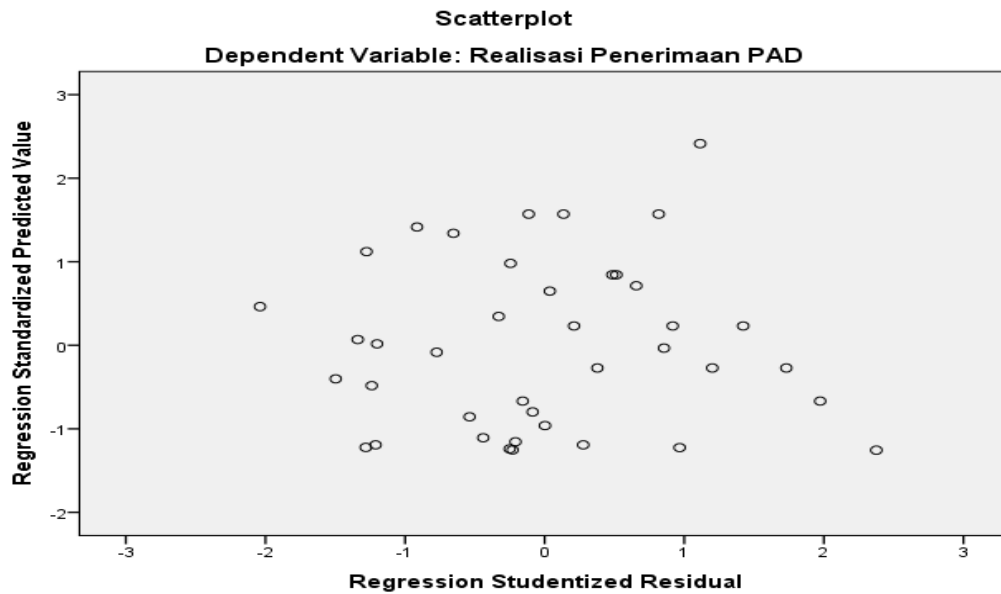
Gambar 2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Gambar 2 menunjukkan bahwa pernyataan bahwa tidak terdapat masalah pada uji normalitas karena berdasarkan grafik di atas terlihat titik-titik koordinat antara nilai observasi dengan data mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memiliki data yang berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah varian dari residual tidak sama untuk semua pengamatan, yang menyebabkan estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi. Jika dari suatu pengamatan tersebut terdapat varian yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas.



Gambar 3 Scatterplot
Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Gambar 3 menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas menampilkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga data layak dipakai.

Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Collinearity Model

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Rasio Efektifitas	.001	1249.734
Rasio Efisiensi	.001	1249.734

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai tolerance < 1 Hasil perhitungan menghasilkan nilai dibawah angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2 Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-174.845	214.876		-.814	.421		
1 Rasio Efektifitas	.898	1.020	4.767	.880	.385	.001	1249.734
Rasio Efisiensi	4.623	5.654	4.429	.818	.019	.001	1249.734

a. Dependent Variable: Realisasi Penerimaan PAD

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Persamaan Regresi $Y = -174,845 + 0.898X_1 + 4.623X_2$ menggambarkan bahwa variabel bebas (*independent*) Pengelolaan Keuangan (X) dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan jika satu

variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (dependen) Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar nilai koefisien (*b*) dari nilai variabel independen tersebut. Konstanta (α) sebesar -174,845 memberikan pengertian bahwa jika Pengelolaan Keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi sama dengan nol (0) maka besarnya Realisasi Penerimaan PAD (Y) sebesar -174,845 satuan. Konstanta negatif tidaklah menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama model regresi yang anda uji sudah memenuhi asumsi (uji asumsi klasik). Selain itu, selama nilai slope tidak NOL maka tidak perlu memperdulikan konstanta negatif ini. Konstanta yang negatif ini tidak menjadi masalah sepanjang X1 dan X2 tidak mungkin sama dengan 0.

Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari Rasio Efektifitas (X_1) sebesar 0.898 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Rasio Profitabilitas (X_1) bertambah 1 satuan, maka Realisasi Penerimaan PAD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.898 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan. Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari Rasio Efisiensi (X_2) sebesar 4.623 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Rasio Profitabilitas (X_1) bertambah 1 satuan, maka Realisasi Penerimaan PAD (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 4.623 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis F dan t

Tabel 3 Uji Hipotesis t

Model	Uji t		Uji F	
	t	Sig	F	Sig
Constant				
Rasio Efektifitas	.880	.385	2.792	.004
Rasio Efisiensi	.818	.019		

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel 3 dapat dilihat bahwa Rasio Efektifitas (X_1) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,385 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak atau Rasio Efektifitas (X_1) tidak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD (Y). Rasio Efisiensi (X_2) memiliki tingkat signifikansi p-value = 0,019 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Rasio Efisiensi (X_2) berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD (Y). Uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikansi p-value = 0,004 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima Rasio Efektifitas (X_1) dan Rasio Efisiensi (X_2) berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan PAD (Y).

Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.362 ^a	.131	.084	.53695

Sumber : Olah data SPSS 20, 2019

Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.362 artinya mempunyai hubungan lemah. Nilai Koefisien Determinasi (R²) adalah 0,131 atau 13,1% Artinya Pengelolaan Keuangan berdasarkan Rasio Efektifitas dan Efisiensi (X) dapat menjelaskan variasi Realisasi Penerimaan PAD sebesar 13,1% dan sisanya sebesar 86,9% di diterangkan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas terhadap Kinerja Keuangan

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintahdaerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumenkebijakan yang utama bagi pemerintah daerah Keuangan Daerah haruslah diolah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber dayakeuangan daerah serta untuk

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya rasio efektifitas.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan

Efisiensi adalah perbandingan atau rasio dari keluaran (output) dengan masukan (input). Efisiensi mengacu pada bagaimana baiknya sumber daya digunakan untuk menghasilkan output. Efektivitas adalah derajat pencapaian tujuan dari system yang diukur dengan perbandingan atau rasio dari keluaran (output aktual) yang dicapai dengan keluaran (output) standard yang diharapkan. Efisiensi dapat dikatakan sebagai penghematan penggunaan sumber daya dalam kegiatan organisasi, dimana efisiensi pada 'daya guna'. Dengan efisiensi dimaksudkan pemakaian sumber daya yang lebih sedikit untuk mencapai hasil yang sama. Efisiensi merupakan 'ukuran' yang membandingkan rencana penggunaan masukan (input) dengan realisasi penggunaannya. Efisiensi 100% sangat sulit dicapai, tetapi efisiensi yang mendekati 100% sangat diharapkan dan konsep ini lebih berorientasi pada input daripada output. Pencapaian suatu kumpulan hasil yang telah direncanakan merujuk kepada efektivitas. Jadi pemakaian sumber daya disini tidak dipersoalkan. Dengan kata lain, efektivitas berurusan dengan seberapa baik hasilnya tercapai, dimana efektivitas merujuk pada 'hasil guna'. Jadi efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan seberapa baik atau seberapa jauh sasaran (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Nilai efektivitas dicerminkan oleh perbandingan nilai output akhir dengan output yang direncanakan. Makin besar prosentasi sasaran yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Konsep efektivitas yang tinggi belum tentu menunjukkan efisiensi yang tinggi pula. Suatu proses dikatakan lebih efektif bila dengan masukan (input) yang sama diperoleh keluaran (output) yang lebih besar, hasil yang lebih baik atau dalam waktu lebih singkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya setiap perubahan kinerja keuangan dalam bentuk peningkatan atau penurunan dipengaruhi oleh perubahan rasio efisiensi.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas dan Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efektifitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
3. Pengelolaan keuangan yang diukur dengan Rasio Efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Saran

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kotamobagu sebaiknya lebih meningkatkan efektifitas penerimaan PAD yaitu dengan meningkatkan realisasi penerimaan PAD dibandingkan target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Kota Manado , Bitung, Tomohon dan Kotamobagu sebaiknya mempertahankan efisiensi biaya pemungutan PAD sehingga penerimaan PAD dapat lebih dimaksimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Halim. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

Kaunang. 2016. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). Jurnal.Diakses Tanggal 12 February 2019.

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit. ANDI, Yogyakarta.

Ratna dan Rasrah (2016). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal. Diakses Tanggal 12 February 2019.

